

**MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN :  
STUDI KASUS DI KPH MODEL KABUPATEN BANJAR,  
KALIMANTAN SELATAN**  
*(Improved Community Participation Model in Policy Implementation of  
Forest Management Unit: Case Studies in Forest Management Unit of Banjar  
District, South Kalimantan)*

**Idin Saepudin Ruhimat**  
Balai Penelitian Teknologi Agroforestry  
Jl. Raya Ciamis Banjar KM 4, Ciamis, Jawa Barat  
Email : idintea@yahoo.co.id

Diterima 10 Juni 2013, direvisi 18 Juli 2013, disetujui 29 Juli 2013

**ABSTRACT**

*Community participation is one of the important factors that determine the effectiveness of policy implementation of Forest Management Units (FMU) in Indonesia. However, community participation in FMU policy implementation in several places are still relatively low so that inhibiting the FMU policy implementation. This study aims to analyze the influence model of ability, opportunity, and motivation to community participation and to formulate models of community participation enhancement in FMU policy implementation in Banjar Regency. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) analysis with the help of SPSS 18 and AMOS 18. Results showed (1) motivation variables directly influence the level of community participation, while capacity and the opportunity variables indirectly influence the level of community participation, and (2) model of community participation improvement is by increasing the community motivation through efforts to increase capabilities and to expand opportunities for the community to actively participate in FMU policy implementation in Banjar Regency.*

*Keyword: Community participation, policy implementation, forest management unit policy*

**ABSTRAK**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di beberapa tempat masih tergolong rendah sehingga menghambat kelancaran implementasi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengaruh kemampuan, kesempatan, dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat serta merumuskan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan bantuan program SPSS Versi 18 dan AMOS Versi 18. Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel motivasi berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat sedangkan variabel kemampuan dan kesempatan masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat, dan (2) model peningkatan partisipasi masyarakat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah dengan cara meningkatkan motivasi masyarakat melalui usaha peningkatan kemampuan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, kebijakan kesatuan pengelolaan hutan

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan seperti UU No 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 junto PP No 3 tahun 2008 beserta peraturan pendukungnya memiliki peran dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Peran kebijakan pembentukan KPH diantaranya sebagai dasar hukum untuk penyelenggara pengelolaan hutan lestari sesuai dengan fungsinya, mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik sektor kehutanan, menjamin kemudahan dan kepastian investasi bidang kehutanan, dan meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi dan perlindungan hutan (Anonim, 2011).

Optimalisasi terhadap peran kebijakan KPH dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KPH. Hal ini dikarenakan implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu tahapan penting yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik. Dwidjowijoto (2006) menyebutkan 60 persen keberhasilan sebuah kebijakan publik ditentukan oleh tingkat efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KPH adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kebijakan KPH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian implementasi kebijakan KPH. Hal ini sejalan dengan teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan efektivitas implementasi sebuah kebijakan publik adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2006).

Penelitian Kusumedi dan Rizal (2009) mengemukakan terhambatnya implementasi kebijakan di KPH Model Maros Sulawesi Selatan disebabkan oleh belum adanya partisipasi aktif *stakeholders*, terutama masyarakat, dalam pembuatan rancang bangun pembangunan konsep KPH Model di tingkat masyarakat dan lembaga adat yang ada di daerah setempat. Ruhimat (2009) menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di KPH Model Banjar, Kalimantan Selatan merupakan permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama rendahnya tingkat efektivitas implementasi kebijakan KPH adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang berada di wilayah KPH dalam setiap tahapan implementasi kebijakan KPH.

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program yaitu faktor kemampuan masyarakat, faktor kesempatan, dan faktor motivasi (Slamet, 2003). Hasil penelitian Suprayitno dkk. (2011) menyebutkan peningkatan partisipasi petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi (motivasi untuk meningkatkan pendapatan, motivasi untuk mendapat pengakuan, dan motivasi untuk melestarikan hutan) dan kemampuan petani (kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial). Selain faktor motivasi dan kemampuan petani, faktor kesempatan/peluang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat yaitu melalui faktor motivasi. Berdasarkan pendapat Slamet dan Suprayitno tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam sebuah program atau

kebijakan, yaitu faktor kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah kebijakan, faktor motivasi masyarakat yang mendorong kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan implementasi kebijakan, dan faktor kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka diperlukan sebuah penelitian untuk merumuskan model peningkatan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan faktor kemampuan, kesempatan dan motivasi petani dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis model pengaruh faktor kemampuan, kesempatan, dan motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan (2) merumuskan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh *stakeholders* terkait (pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, dan LSM) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Peramasan Bawah dan Desa Angkipih, Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* terhadap dua desa yang berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembentukan KPH di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan kuisioner tertutup. Format jawaban dalam kuisioner menggunakan skala Likert (*Likert Summated Rating*) dengan 5 (lima) alternatif jawaban, masing-masing alternatif jawaban diberi skor sebagai berikut : kategori sangat mendukung pernyataan (skor 5), mendukung pernyataan (skor 4), cukup mendukung pernyataan (skor 3), kurang mendukung pernyataan (skor 2), dan tidak mendukung pernyataan (skor 1).

Jumlah skor pada masing-masing variabel/indikator dibagi menjadi tiga kategori nilai yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pembagian tiga kategori nilai dihitung dengan cara sebagai berikut :

- Skor minimal = skor terkecil x jumlah item x jumlah responden
- Batas 1 = skor minimal + ((skor maksimal - skor minimal) x 1/3)
- Batas 2 = skor minimal + ((skor maksimal - skor minimal) x 2/3)
- Skor Maksimal = skor terbesar x jumlah item x jumlah responden

Sedangkan untuk menentukan definisi batasan setiap nilai ditentukan dengan melihat posisi skor total variabel/indikator dalam interval nilai yang telah dibuat, yaitu:

- Skor minimal sampai batas 1 = rendah
- Batas 1 sampai batas 2 = sedang, dan
- Batas 2 sampai skor maksimal = tinggi

### C. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

- Mengidentifikasi jumlah populasi yang terdiri dari semua kepala keluarga yang berdomisili di dua desa penelitian. Jumlah seluruh kepala keluarga yang berada di dua

desa penelitian adalah 745 kepala keluarga, yang terdiri dari 198 kepala keluarga di Desa Angkipih dan 547 kepala keluarga di Desa Peramasan Bawah. Pengambilan sampel tahap pertama dilakukan dengan mengambil 21 persen dari jumlah total kepala keluarga yang berdomisili di dua desa penelitian sebagai sampel sehingga diperoleh sampel sebanyak 156 kepala keluarga. Pengambilan sampel sebanyak 21 persen dari jumlah populasi didasarkan kepada pendapat yang dikemukakan Arikunto (2002) yang menyatakan bahwa untuk jumlah populasi lebih dari 100 sebaiknya sampel yang diambil berkisar antara 20 - 25 persen dan Santoso (2012) yang menyebutkan jumlah sampel efektif untuk analisis SEM berkisar antara 150 sampai dengan 400 sampel. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dan keterbatasan sumberdaya penelitian (biaya, waktu dan tenaga) maka jumlah sampel 156 orang (21 persen dari populasi) telah memenuhi persyaratan teknik pengambilan sampel untuk analisis SEM.

2. Pengambilan sampel tahap kedua dilakukan secara acak proporsional (*Proporsionate Random Sampling*) untuk mendapatkan sebaran responden yang proporsional dan acak dari setiap desa penelitian terpilih, dengan menggunakan rumusan alokasi proporsional sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro, 2007):

$$n_i = \frac{N_i}{N} n$$

dimana :  $n_i$  = jumlah sampel dalam stratum  $i$ ;  $n$  = jumlah sampel seluruhnya;  $N_i$  = jumlah populasi dalam stratum  $i$ ; dan  $N$  = jumlah populasi seluruhnya.

Berdasarkan rumus sebaran responden yang telah disebutkan, maka jumlah sampel pada masing-masing desa penelitian adalah 41 kepala keluarga di Desa Angkipih dan 115 kepala keluarga di Desa Peramasan Bawah.

#### D. Variabel Penelitian

Terdapat empat variabel yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat kemampuan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH ( $X_1$ ), variabel tingkat kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH ( $X_2$ ), variabel tingkat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH ( $X_3$ ), dan variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH ( $Y$ ).

#### E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif dilakukan dengan bantuan program SPSS 18 sedangkan statistik inferensial dilakukan dengan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan bantuan program AMOS 18. Analisis SEM merupakan alat analisis statistik yang menggabungkan analisis faktor dan analisis regresi yang bertujuan untuk menganalisis model keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya atau antara variabel dengan indikator penyusunnya yang tidak dapat dilakukan dengan alat analisis lainnya seperti uji t, anova, korelasi, atau regresi berganda (Santoso, 2012).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Variabel Penelitian

##### 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH memiliki skor total 1949 yang berada pada interval skor 1248 - 2912 sehingga tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat juga dari skor total masing-masing indikator penyusun variabel tingkat partisipasi yang terdiri dari partisipasi dalam perencanaan (457), pelaksanaan (505), pemeliharaan (490),



dan monitoring evaluasi (407) yang berada dalam interval rendah. Kategori nilai untuk

variabel tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi tingkat partisipasi masyarakat  
*Table 1. Description of community participation level*

Variabel/Indikator (Variable/indicator)	Total skor (Total score)	Interval Skor ( Score Interval)		
		Tinggi (High)	Sedang (Moderate)	Rendah (Low)
Tingkat Partisipasi Masyarakat	1949	4576 - 6240	2912 - 4576	1248 - 2912
Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan	457	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan	595	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan	490	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Partisipasi Masyarakat dalam Monev	407	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728

## 2. Tingkat Kemampuan Masyarakat

Secara umum, skor total tingkat kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar adalah 2383 yang berada pada interval 1560 - 3640 (kategori

rendah). Hal ini dikuatkan dengan rendahnya semua indikator variabel tingkat kemampuan masyarakat baik kemampuan teknis, kemampuan manajerial, maupun kemampuan sosial. Kategorisasi skor variabel kemampuan dan indikator penyusunannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi tingkat kemampuan masyarakat  
*Table 2. Description of community capabilities level*

Variabel/Indikat or (Variable/indicator)	Total skor (Total score)	Interval Skor ( Score Interval)		
		Tinggi (High)	Sedang (Moderate)	Rendah (Low)
Tingkat Kemampuan Masyarakat	2383	5720 - 7800	3640 - 5220	1560 - 3640
Kemampuan Teknis	1010	2288 - 3120	1456 - 2288	624 - 1456
Kemampuan Manajerial	614	1716 - 2340	1092 - 1716	468 - 1092
Kemampuan Sosial	759	1716 - 2340	1092 - 1716	468 - 1092

## 3. Tingkat Kesempatan

Berdasarkan hasil perhitungan skor total

variabel kesempatan maka diperoleh hasil seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi tingkat kesempatan  
Table 3. Description of community opportunities level

Variabel/Indikator (Variable/indicator)	Total skor (Total score)	Interval Skor ( Score Interval)		
		Tinggi (High)	Sedang (Moderate)	Rendah (Low)
Tingkat Kesempatan	2428	5720 - 7800	3640 - 5720	1560 - 3640
Dukungan Pemer intah	462	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Dukungan Pemerintahan Desa	576	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Dukungan Tokoh Masyarakat	467	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Dukungan LSM	452	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728

Kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar memiliki skor total sebesar 2428 sehingga berada pada kategori rendah, baik yang bersifat dukungan pemerintah, dukungan pemerintahan desa, dukungan swasta, dukungan tokoh masyarakat, maupun dukungan dari lembaga swadaya masyarakat.

#### 4. Tingkat Motivasi

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar yang terdiri dari motivasi untuk pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, diakui oleh masyarakat lain, maupun pelestarian hutan berada dalam kategori rendah. Hal ini diperlihatkan oleh hasil analisis yang dilakukan terhadap skor variabel tingkat motivasi seperti terlihat pada Tabel 4.

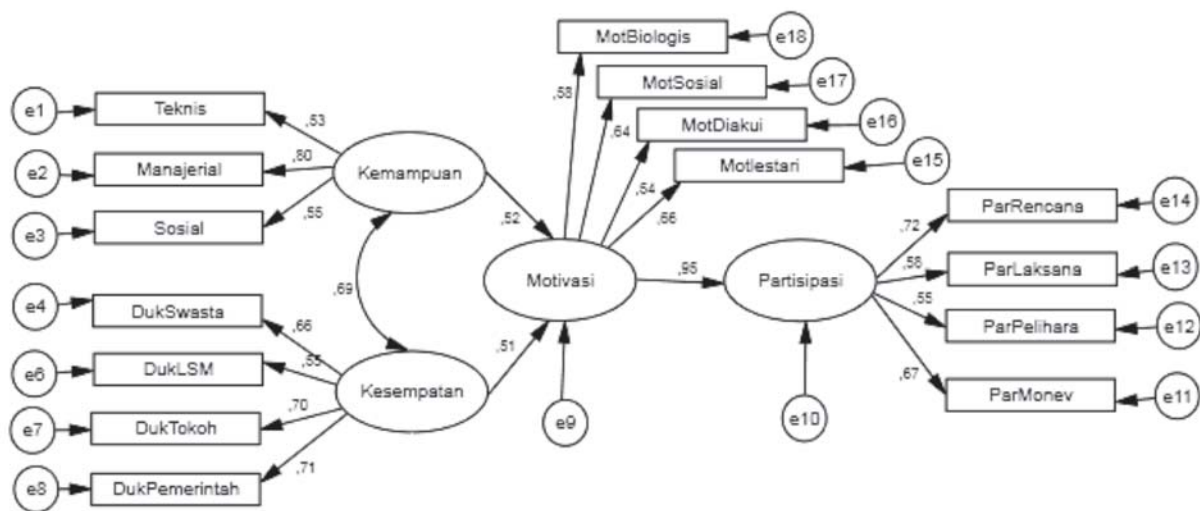
Tabel 4. Deskripsi tingkat motivasi  
Table 4. Description of community motivation level

Variabel/Indikator (Variable/indicator)	Total skor (Total score)	Interval Skor ( Score Interval)		
		Tinggi (High)	Sedang (Moderate)	Rendah (Low)
Tingkat Motivasi	2439	5720 - 7800	3640 - 5720	1560 - 3640
Motivasi Bio logis	792	1716 - 2340	1092 - 1716	468 - 1092
Motivasi Sosial	502	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728
Motivasi Diakui	748	1716 - 2340	1092 - 1716	468 - 1092
Motivasi Melestarikan Hutan	397	1144 - 1560	728 - 1144	312 - 728

#### B. Model Pengaruh Kesempatan, Kemampuan dan Motivasi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi KPH

Pengaruh kesempatan, kemampuan, dan motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dianalisa dengan meng-

gunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) program AMOS Versi 18. Hasil akhir analisis SEM dengan program AMOS 18 dapat digambarkan dalam model struktural pengaruh kesempatan, kemampuan dan motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) seperti dalam Gambar 1.



Chi-square = 96.396 df = 81 P-value = ,117 RMSEA = ,035 GFI = ,924

Gambar 1. Model struktural pengaruh kesempatan, kemampuan, dan motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH

Figure 1. Structural model of the effect of opportunity, capabilities, and motivation to community participation level in policy implementation of Forest Management Unit

Hasil akhir analisis SEM menunjukkan variabel tingkat motivasi masyarakat berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH, sedangkan variabel tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH yaitu melalui variabel tingkat motivasi. Hasil analisis SEM yang terlihat dalam Gambar 1, dapat dijabarkan menjadi pengaruh variabel tingkat motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, pengaruh variabel tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan terhadap variabel tingkat motivasi, pengaruh variabel tingkat kemampuan terhadap tingkat partisipasi, dan pengaruh variabel tingkat kesempatan terhadap tingkat partisipasi.

### 1. Pengaruh faktor tingkat motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH

Faktor tingkat motivasi berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi

masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH. Hasil akhir analisis SEM menunjukkan besaran total pengaruh motivasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH adalah 0,95 atau 95%. Berdasarkan Sarwono (2011) angka 95% diartikan tingkat motivasi masyarakat berpengaruh sangat besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH.

Bentuk motivasi masyarakat yang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam implementasi kebijakan KPH secara berurutan adalah motivasi yang bertujuan untuk pelestarian hutan, motivasi sosial sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat lainnya, motivasi yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis (sandang, pangan, dan papan), dan motivasi untuk diakui kemampuannya oleh masyarakat lain. Motivasi masyarakat dengan tujuan pelestarian hutan merupakan faktor pertama yang harus diberikan perhatian oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan KPH di

Kabupaten Banjar karena masyarakat di dua desa penelitian menganggap bahwa dengan mempertahankan kelestarian hutan yang berada di daerah sekitar tempat tinggal masyarakat akan memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

## **2. Pengaruh tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan terhadap tingkat motivasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH**

Hasil analisis SEM (Gambar 1) menunjukkan tingkat motivasi masyarakat dipengaruhi langsung oleh tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan yang dimiliki masyarakat. Hal ini berarti untuk memperbesar tingkat motivasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH. Persamaan struktural pengaruh kemampuan dan kesempatan terhadap tingkat motivasi adalah :

$$X_3 = 0,52 X_1 + 0,51 X_2 + \zeta; R^2 = 0,88 \text{ atau } 88\%$$

dimana :  $X_1$  = tingkat kemampuan;  $X_2$  = tingkat kesempatan;  $X_3$  = tingkat motivasi;  $\zeta$  = faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi masyarakat selain tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan; dan  $R^2$  = Besaran pengaruh tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan secara bersama-sama terhadap motivasi masyarakat.

Persamaan struktural di atas mengandung pengertian tingkat motivasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan masyarakat baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama. Besarnya pengaruh tingkat kemampuan dan

kesempatan terhadap tingkat motivasi secara bersama-sama adalah 88%. Berdasarkan Sarwono (2011) angka 88% menunjukkan tingkat kemampuan dan kesempatan secara bersama-sama berpengaruh sangat besar terhadap tingkat motivasi masyarakat.

## **3. Pengaruh tingkat kemampuan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH**

Tingkat kemampuan masyarakat memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, yaitu melalui tingkat motivasi masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.

Besaran pengaruh tidak langsung tingkat kemampuan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH adalah sebesar 0,49 atau 49%. Berdasarkan Sarwono (2011) angka 49% mengandung pengertian bahwa secara tidak langsung, tingkat kemampuan masyarakat berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Aspek kemampuan manajerial merupakan aspek paling dominan dari faktor kemampuan masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH. Hal ini dikarenakan kemampuan manajerial merupakan salah satu kemampuan utama dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH. Suprayitno, dkk. (2011) menyebutkan bahwa kemampuan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengaturan, pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan, dan evaluasi merupakan faktor utama yang akan mendorong motivasi dan kepercayaan diri seseorang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan



an tertentu.

Kemampuan sosial merupakan aspek kedua dalam faktor kemampuan yang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Kemampuan sosial yang dimiliki masyarakat akan memberikan rasa kebersamaan, saling percaya, saling terikat, dan saling membantu antar sesama masyarakat atau antara masyarakat dengan *stakeholders* lain sehingga akan memperbesar tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH.

Aspek ketiga dari faktor kemampuan yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar adalah aspek kemampuan teknis yang dimiliki masyarakat. Pada umumnya aspek teknis yang menyangkut cara pemanfaatan hutan telah dimiliki oleh masyarakat di lokasi penelitian, akan tetapi hanya sebatas kemampuan yang bersifat turun temurun dan belum tersentuh oleh teknologi yang berasal dari luar masyarakat. Sebagian besar masyarakat dalam wilayah Desa Peramasan Bawah dan Desa Angkipih masih memanfaatkan hutan dengan cara ekstraksi atau pemungutan hasil hutan yang disediakan alam dan belum berusaha untuk memperoleh hasil dari tanaman kehutanan yang dibudidayakan.

#### **4. Pengaruh tingkat kesempatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH**

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hasil akhir analisis SEM menunjukkan faktor kesempatan berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Hal ini berarti besarnya tingkat

kesempatan yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat melalui peningkatan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.

Besaran pengaruh tidak langsung tingkat kesempatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,48 atau 48%. Berdasarkan Sarwono (2011) angka 48% mengandung pengertian bahwa tingkat kesempatan memiliki pengaruh tidak langsung yang cukup besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Aspek dari variabel kesempatan yang berpotensi besar dalam mempengaruhi tingkat motivasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH secara berturut-turut adalah aspek dukungan pemerintah, aspek dukungan tokoh masyarakat, aspek dukungan swasta, dan aspek dukungan LSM.

Aspek dukungan pemerintah merupakan aspek paling penting dan dominan yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di lokasi penelitian. Hasil analisis SEM tentang pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH menunjukkan bahwa pemerintah diharuskan mengubah pendekatan pengelolaan kehutanan yang awalnya menempatkan masyarakat sebagai objek menjadi subjek pembangunan dan pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia. Wibowo (2006) mengemukakan semenjak bergulirnya orde reformasi di Indonesia terjadi perubahan pendekatan pengelolaan hutan di Indonesia dari pendekatan yang berbasis peran negara (*state based forest management*) menjadi pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*).

Selain dukungan pemerintah, dukungan tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun tokoh informal merupakan salah satu aspek

penting yang berpotensi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH. Wibowo (2006) menyebutkan tokoh masyarakat, terutama masyarakat adat, memegang tampuk kepemimpinan tertinggi dalam organisasi sosial masyarakat desa hutan yang memiliki otoritas penuh terhadap warga desa hutan. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memutuskan segala sesuatu yang terdapat dalam suatu komunitas masyarakat seperti Kepala Desa Peramasan Bawah dan Kepala Desa Angkipih, tokoh adat yang ada di Desa Peramasan Bawah dan tokoh agama Islam yang ada di Desa Angkipih.

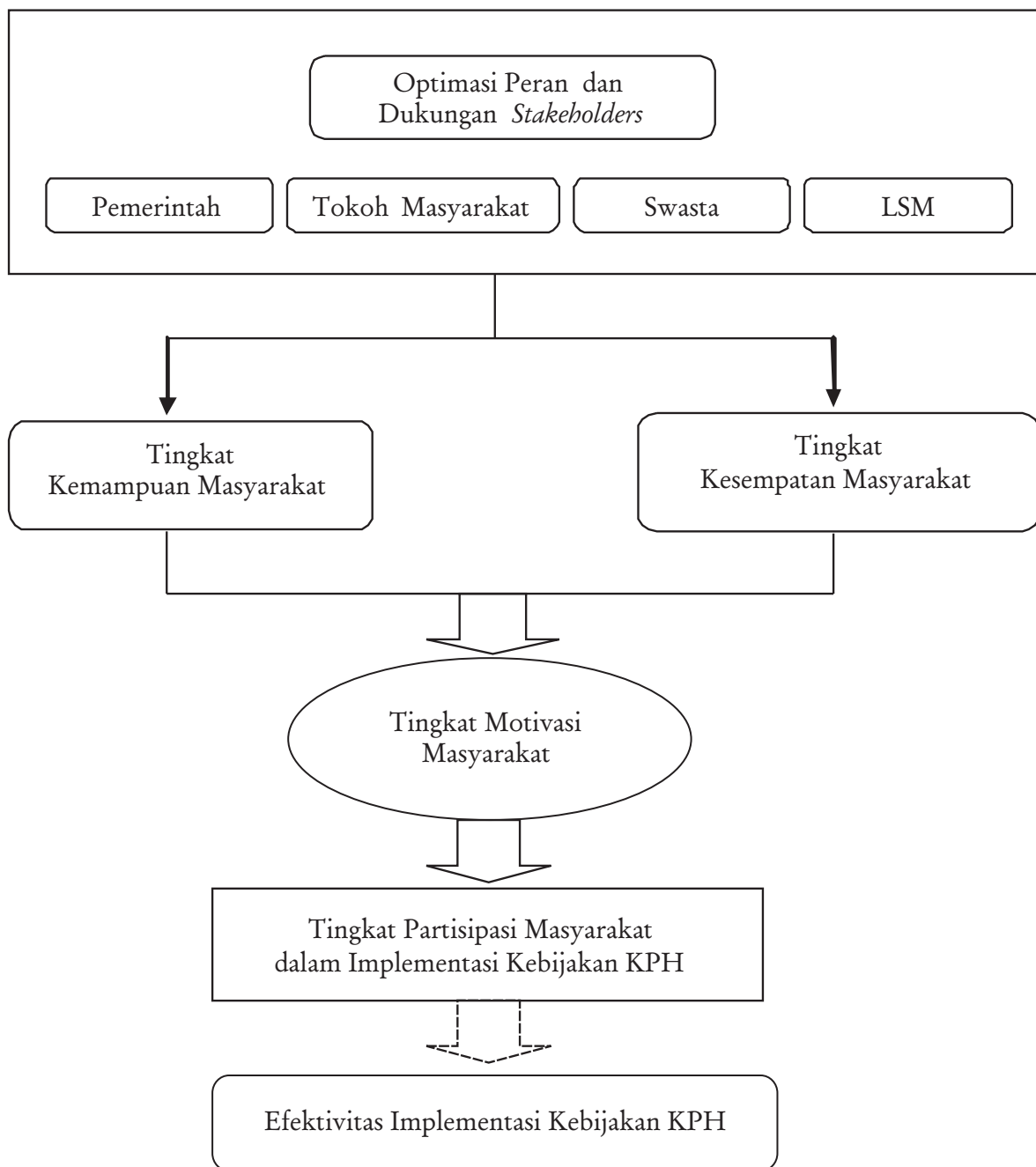
Aspek dukungan swasta merupakan aspek penting ketiga setelah dukungan pemerintah dan dukungan tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH. Salah satu bentuk dukungan pihak swasta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah program kemitraan antara pihak pemodal dengan masyarakat

kat dalam implementasi kebijakan KPH seperti inisiasi kemitraan dalam pemanfaatan lahan eks Hutan Produksi Alam Emil Timber antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Peramasan Bawah.

Aspek dukungan LSM merupakan aspek lainnya yang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di lokasi penelitian. Dukungan LSM tersebut dalam bentuk pembinaan dan pendampingan masyarakat pada setiap proses implementasi kebijakan KPH Model di Kabupaten Banjar.

### **C. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH**

Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dapat dideskripsikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Figure 2. Model for increasing community participation in implementation of Forest Management Unit policy

Berdasarkan hasil analisis SEM yang telah dilakukan maka peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Adapun peningkatan motivasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dan memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH.

Peningkatan kemampuan (kemampuan manajerial, kemampuan sosial, dan kemampuan teknis) dan kesempatan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran dan dukungan *stakeholders* terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Bentuk optimasi peran dan dukungan *stakeholders* terkait, di antaranya:

1. **Pemerintah.** Bentuk dukungan pemerintah dalam peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang berada di dalam wilayah KPH Kabupaten Banjar secara berkesinambungan, mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan dalam implementasi kebijakan KPH baik peran fasilitator maupun peran pendidik, memberikan payung hukum dan jaminan yang kuat kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan implementasi kebijakan KPH, dan menjadi fasilitator, regulator serta pengawas berjalannya kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta dalam berbagai program implementasi kebijakan KPH.
2. **Tokoh Masyarakat.** Bentuk dukungan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat adalah dengan mendorong dan memberikan pemahaman yang dapat menyadarkan

anggota masyarakat akan pentingnya pembentukan KPH untuk kelestarian hutan di wilayahnya.

3. **Swasta.** Bentuk dukungan pihak swasta dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam program kemitraan di wilayah KPH, dan membantu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat secara berkesinambungan.
4. **Lembaga Swadaya Masyarakat.** Bentuk peran LSM dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH adalah dengan melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kebijakan KPH. Selain itu, LSM juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan masyarakat baik dalam hal manajerial, sosial, maupun teknis.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan secara umum adalah rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan secara langsung oleh rendahnya motivasi yang dimiliki masyarakat dan secara tidak langsung oleh rendahnya tingkat kemampuan masyarakat, dan rendahnya tingkat kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian adalah peningkatan partisipasi



masyarakat melalui proses peningkatan motivasi masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPH.

3. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam penelitian ini adalah dengan mengoptimalkan peran *stakeholders* terkait seperti pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, dan LSM.

## B. Saran

1. Seluruh *stakeholders* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar disarankan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH.
2. Pemerintah disarankan memberikan payung hukum yang lebih kuat dan mengikat seluruh *stakeholders* untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar.
3. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perlu dilakukan secara berkesinambungan supaya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan implementasi kebijakan KPH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun monitoring evaluasi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Lo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Anonim. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dwidjowijoto, R.N. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kusumedi, P. dan Achmad Rizal HB. 2010. Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7 No 3. Bogor.
- Riduwan dan Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Alfabeta. Bandung.
- Ruhimat, I.S. 2010. Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7 No 3. Bogor.
- Santoso, S. 2012. Analisis SEM Menggunakan AMOS. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sarwono, J. 2012. Path Analysis : Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi, Tesis, Disertasi dengan Menggunakan SPSS. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Slamet, M. 2003. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Penyunting Ida Yustina dan Ajad Sudradjat. IPB Press. Bogor.
- Suprayitno, S., D.S Gani dan B.G. Sugihen. 2011. Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat: Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusarung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol 8 No 3. Bogor.
- Wibowo, S. 2006. Rehabilitasi Hutan Pasca Operasi Illegal Logging. Wana Aksara. Banten.